

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Perkembangan BPD di Indonesia

1. BPD Sulawesi Tenggara

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan. BPD Sulawesi Tenggara pada masa-masa yang akan datang kinerja BPD Sulawesi Tenggara akan lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan jaringan operasional dan pengembangan usaha saat ini sedang diupayakan perubahan status BPD Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). BPD Sultra terdiri atas 41 kantor, yaitu 1 kantor pusat non operasional, 6 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 29 kantor kas, serta 30 Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Sampai dengan 31 Desember 2012 BPD Sultra memiliki 475 orang pegawai.

2. BPD Yogyakarta

Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur

melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

3. BPD Kalimantan Timur

BPD Kaltim adalah salah satu Perusahaan Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim sebagai hasil buah pikiran Gubernur KDH Tingkat I Kaltim Bapak A. Moeis Hasan yang didirikan tanggal 14 Oktober 1965 berdasarkan Perda. BPD Kaltim sebagai Bank Umum, setelah usianya mencapai 41 tahun telah beroperasi sebagai bank Devisa dan juga telah memiliki kegiatan Usaha secara Syariah berdasarkan Ijin Prinsip dan Ijin Operasional dan Bank Indonesia. Sejalan waktu, BPD Kaltim makin berkembang. Sejumlah sektor usaha mulai dilirik untuk digarap. Namun payung hukum yang ada, membatasi ruang gerak BPD Kaltim untuk berkembang dinamis. Dengan landasan hukum terbaru Perda 02 Th 2006 disertai surat BI No. 5/48/KEP.DGS/2003 tanggal 13 Nopember 2003, BPD Kaltim meningkatkan status operasionalnya menjadi Bank Umum Devisa.

4. PT Bank DKI

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya”. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, kedudukan hukum Perseroan diubah dan dialihkan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta.

Konsistensi pertumbuhan kinerja untuk meraih kepercayaan masyarakat melalui inovasi produk dan jasa perbankan, peningkatan kualitas pelayanan, implementasi tata kelola perusahaan yang dipadu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus Bank DKI yang berdiri sejak 11 April 1961. Bank DKI memfokuskan kegiatan usahanya pada empat segmen utama yang memberi peluang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, yaitu segmen perbankan konsumen, segmen perbankan komersial dan segmen perbankan KPR dan UMKM, serta perbankan syariah.

5. PT Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik

bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank.

6. PT Bank Kalimantan Tengah

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) semula berbentuk Perseroan Terbatas (PT), didirikan pada tanggal 28 Oktober 1961 dengan nama PT. BPD Kalimantan Tengah. Dalam akta pendirian tersebut PT. BPD Kalimantan Tengah menjalankan usaha bank di Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Pada tahun 1981 semua saham milik swasta dibeli oleh pemerintah sehingga Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 menetapkan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan sebutan PT. Bank Pembangunan Kalteng dengan modal dasar ditingkatkan menjadi 60 miliar yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni dimiliki oleh Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemda Kota dan Kabupaten se-

Kalimantan Tengah. Sedangkan penyingkatan sebutan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menjadi PT. BANK KALTENG sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

7. PT BPD Jambi

Bank Jambi merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Sejak tanggal 22 November 2007, Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi.

Bidang usaha Bank Jambi meliputi seluruh kegiatan bank umum, termasuk sebagai Pemegang Kas Daerah yang berfungsi melaksanakan dan mengelola penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta mengutamakan pembiayaan bidang proyek Pembangunan Daerah.

8. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. Dimana dalam Akta para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

9. PT BPD Lampung

Bank Lampung (PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung) yang resmi beroperasi tanggal 31 Januari 1966 didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kemudian Bank Pembangunan Daerah Lampung merubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan perbankan, guna meningkatkan permodalan bank, daya saing, perluasan produk dan usaha bank serta dalam rangka memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

pemilikan saham, dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai Bank Umum dan pemegang Kas Daerah,

10. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS. Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.

11. PT BPD Sumatera Barat

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”. Dalam

perjalanannya tahun 1996 melalui Perda No. 2 / 1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai "Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

12. PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa serta mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru.

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan

dengan sistem syariah. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten, maka perseroan telah resmi berubah menjadi bank bjb.

13. PT BPD Maluku

Bank Maluku didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Maluku. Bentuk usaha Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah menjadi Badan Usaha milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, bentuk badan hukum bank Pembangunan Daerah Maluku diubah dari Perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Bank Pembangunan Daerah Bengkulu didirikan pada tanggal 9 Agustus 1969. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

14. PT BPD Bengkulu

Bank Pembangunan Daerah Bengkulu didirikan pada tanggal 9 Agustus 1969. Misi dan fungsi BPD Bengkulu sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 1992 diakui sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala

bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan memperhatikan kondisi perbankan pada akhir-akhir ini yang kurang baik, maka untuk meningkatkan kinerja Bank Pembangunan Daerah Bengkulu telah diikut sertakan dalam program rekapitalisasi, dengan dilakukan perjanjian bersama antara Pemerintah RI, BPD dan Bank Indonesia pada tanggal 7 Mei 1999 yang selanjutnya BPD Bengkulu harus melakukan restrukturisasi.

15. PT BPD Jawa Tengah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka

manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

16. PT BPD Jawa Timur

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Selanjutnya status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

17. PT BPD Kalimantan Barat

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah. Pada tanggal 2 Februari 1999 terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan *call name* Bank Kalbar. Bulan Desember 2005, Bank Kalbar melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Kantor Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak.

Untuk memberikan layanan terbaik kepada para nasabah, Bank Kalbar telah membuka Layanan Ekstra. Selain itu, Bank Kalbar juga memiliki jaringan ATM yang telah terintegrasi dengan ATM Bersama dan ATM MEPS (Malaysian Electronic Payment System) sehingga kartu ATM Bank Kalbar dapat digunakan untuk bertransaksi di seluruh mesin ATM di Indonesia yang berlogo ATM Bersama dan juga di Malaysia yang berlogo BankCard.

18. PT BPD Nusa Tenggara Barat

Bank NTB adalah Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Bank NTB didirikan dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai kas daerah. Selain itu tujuan didirikannya Bank NTB untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada para pengusaha kecil di Nusa Tenggara Barat. Rekrutmen karyawan pertama berjumlah 10 orang. Modal disetor awal pendirian bank sebesar Rp. 60 juta dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian berkembang sampai dengan 31 Desember 2011 menjadi Rp. 253.091 juta. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan

Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

19. PT BPD Nusa Tenggara Timur

Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur merupakan bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota / Kabupaten se - Nusa Tenggara Timur. Pendirian bank ini berdasarkan ide para sesepuh Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai melakukan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli 1962. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Daerah (PD) melalui Peraturan Daerah (PERDA). Pada momentum inilah status badan hukum PD. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan lagi menjadi Perseroan Terbatas.

20. PT BPD Sulawesi Tengah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang dikenal Bank Sulteng. Dengan modal dasar sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dan sesuai peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang perubahan tentang perubahan bentuk hukum BPD Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 30 Maret 1999.

21. PT BPD Sulawesi Utara

PT. Bank Sulut (Bank) dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 100 milyar dengan kepemilikan Daerah Propinsi. Setelah Bank Sulut melepaskan diri dari program rekapitalisasi perbankan terjadi beberapa perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan perubahan susunan kepemilikan saham setelah divestasi saham negara, dan terakhir dengan peningkatan modal dasar dari Rp. 100 milyar menjadi Rp. 300 milyar.

22. PT BPD Bali

Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan pada tanggal 5 Juni 1962. Perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pada tahun 2004 aktivitas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali ditingkatkan dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa. Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp. 250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah).

23. PT BPD Kalimantan Selatan

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964. PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel. Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah

untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di Daerah;
2. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah;
3. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

24. PT BPD Papua

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966. Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah mengalami beberapa kali peningkatan jumlah modal dan yang terakhir tahun 2010.

25. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan. Perubahan badan hukum terhitung tanggal 1 Oktober 2001, dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh tersebut agar Bank

Sumsel lebih profesional dan mampu bersaing pada era otonomi daerah. Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel

26. PT BPD Sumatera Utara

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU. Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.

4.1.2. Variabel – Variabel yang digunakan dalam Penelitian

Perhitungan efisiensi Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan metode DEA ini menggunakan tiga variable input, yaitu :

1. Simpanan
2. Total asset tetap
3. Biaya operasional.

Sedangkan variabel outputnya yaitu:

1. Total kredit
2. Pendapatan operasional.

Variabel input yang pertama, simpanan yaitu sejumlah dana masyarakat baik individu maupun badan hukum yang berhasil dihimpun oleh bank melalui produk penghimpunan dana.

Pada lampiran 1 menunjukkan bahwa jumlah simpanan 26 BPD di Indonesia dalam penelitian ini terus mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012, meskipun mengalami fluktuasi. Simpanan yang tertinggi dimiliki oleh BJB yaitu sebesar Rp 47,546,537 (dalam jutaan rupiah) dan simpanan yang terendah dimiliki oleh BPD Sultra yaitu sebesar Rp 209,522 (dalam jutaan rupiah).

Simpanan pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 28,234,552 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 437,679 (dalam jutaan rupiah). Simpanan pada tahun 2011 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 37.089.313 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 489,444 (dalam jutaan rupiah). Simpanan tahun 2012 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 47,546,537 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 209,522 (dalam jutaan rupiah).

Kenaikan jumlah simpanan 26 BPD di Indonesia ini, mencerminkan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan BPD di Indonesia dalam peningkatan penghimpunan dana dari masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan BPD di Indonesia tersebut diantaranya dari perbaikan strategi *marketing* masing-masing BPD di Indonesia. Perbaikan dari strategi *marketing* ini dilakukan dengan target nasabah yang tidak hanya dari kalangan nasabah loyal, tetapi juga nasabah mengambang. Ascarya, Diana Y. dan Guruh S. R. (2008) menyebutkan bahwa potensi nasabah mengambang berjumlah lebih dari 80 persen, sedangkan nasabah loyal hanya berkisar 1-10 persen.

Kedua, Total Aset Tetap yang dimiliki oleh BPD di Indonesia. Pada lampiran 2 adapun total aset tetap yang dimiliki 26 BPD di Indonesia mengalami fluktuasi, namun jumlahnya tetap mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012. Total aset tetap yang tertinggi dimiliki oleh BJB yaitu sebesar Rp 589,380 (dalam jutaan rupiah) dan total aset tetap yang terendah dimiliki oleh BPD Jambi yaitu sebesar Rp 19,863 (dalam jutaan rupiah).

Total aset tetap pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 549,014 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 19,863 (dalam jutaan rupiah). Total aset tetap pada tahun 2011 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 559,884 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 20,321 (dalam jutaan rupiah). Total aset tetap pada tahun 2012 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 589,380 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 19,871 (dalam jutaan rupiah).

Kinerja dari BPD di Indonesia yang semakin lebih baik, karena aset tetap bagi perbankan mempunyai pengaruh terhadap dana yang dapat dialokasikan untuk kredit dengan kenaikan total aset tetapnya dari tahun 2010-2012 meskipun beberapa BPD mengalami fluktuasi.

Ketiga, Biaya Operasional yang terdapat di BPD di Indonesia. Pada lampiran 3 Jumlah biaya operasional 26 BPD di Indonesia dalam penelitian bertambah dari tahun ke tahun, namun bersifat fluktuatif. Beban operasional yang tertinggi dimiliki oleh BJB yaitu sebesar Rp 5,426,133 (dalam jutaan rupiah) dan beban operasional yang terendah dimiliki oleh BPD Sultra yaitu sebesar Rp 170,165 (dalam jutaan rupiah).

Beban operasional pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 4,010,175 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 170,165 (dalam jutaan rupiah). Beban operasional pada tahun 2011 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 4,942,324 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 179,642 (dalam jutaan rupiah). Beban operasional pada tahun 2012 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 5,426,133 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 211,095 (dalam jutaan rupiah). Jumlah beban operasional yang semakin besar tiap tahunnya. Hal ini disebabkan kebutuhan jumlah operasional BPD di Indonesia yang semakin bertambah pula tiap tahunnya.

Adapun variabel output yang pertama adalah Total Kredit. Total kredit berarti produk penyaluran dana perbankan kepada masyarakat, baik individu maupun badan hukum yang digunakan untuk investasi, perdagangan ataupun konsumsi, yang dapat memberikan keuntungan bagi bank dengan adanya bunga.

Pada lampiran 4 menunjukkan total kredit dari 26 BPD di Indonesia terlihat semakin baik dari tahun 2010-2012, meskipun mengalami fluktuasi. Peningkatan total kredit ini dilakukan oleh BPD di Indonesia, karena BPD memiliki fungsi yang paling penting sebagai suatu bank. Total kredit yang tertinggi dimiliki oleh BJB yaitu sebesar Rp 35,229,233 (dalam jutaan rupiah) dan total kredit yang terendah dimiliki oleh BPD Sulut yaitu sebesar Rp 197,904 (dalam jutaan rupiah).

Total kredit pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 21,491,791 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 298,846 (dalam jutaan rupiah). Total kredit pada tahun 2011 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 26,490,566

(dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 197,904 (dalam jutaan rupiah). Total kredit pada tahun 2012 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 35,229,233 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 329,830 (dalam jutaan rupiah).

Output selanjutnya adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan hasil dari kegiatan operasional BPD yang ditunjukkan pada lampiran 5. Jumlah pendapatan operasional 26 BPD di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin baik dari tahun 2010-2012, meskipun jumlahnya bersifat fluktuatif. Kenaikan jumlah pendapatan operasional ini dikaitkan dengan upaya BPD sendiri yang telah meningkatkan produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

Pendapatan operasional yang tertinggi dimiliki oleh BJB yaitu sebesar Rp 6,763,918 (dalam jutaan rupiah) dan pendapatan operasional yang terendah dimiliki oleh BPD Sultra yaitu sebesar Rp 300,750 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan operasional pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 5,195,709 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 300,750 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan operasional pada tahun 2011 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 6,213,783 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 306,606 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan operasional pada tahun 2012 yang tertinggi yaitu sebesar Rp 6,763,918 (dalam jutaan rupiah) dan yang terendah yaitu sebesar Rp 331,009 (dalam jutaan rupiah).

Variabel Dependent (Y) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba berarti terjadi kenaikan atau penurunan dari aktiva dan

kewajiban yang diolah dan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Pada lampiran 6 menunjukkan rasio variabel Pertumbuhan Laba pada masing-masing BPD yang terdaftar di BI selama periode penelitian 2010-2012. Rasio pertumbuhan pada lampiran 6 sangat berfluktuasi. Pertumbuhan laba pada BPD tidak hanya bernilai positif tetapi banyak juga BPD yang memiliki pertumbuhan laba negatif. Pertumbuhan laba yang bernilai negatif berarti tidak mengalami pertumbuhan laba pada tahun yang bersangkutan.

Rasio pertumbuhan laba rata-rata per bank yang tertinggi dimiliki oleh Bank Aceh yaitu sebesar 60.72% dan rasio pertumbuhan laba terendah dimiliki oleh BPD Sulut yaitu sebesar -12.65%. Rasio pertumbuhan laba pada tahun 2009-2010 yang tertinggi yaitu sebesar 100.53% dan yang terendah yaitu sebesar -28.96%. Rasio pertumbuhan laba pada tahun 2010-2011 yang tertinggi yaitu sebesar 113.60% dan yang terendah yaitu sebesar -28.93%. Rasio pertumbuhan laba pada tahun 2011-2012 yang tertinggi yaitu sebesar 91.99% dan yang terendah yaitu sebesar -15.76%.

4.2. Hasil Penelitian

Efisiensi merupakan salah satu pencerminan kinerja perbankan. Suatu bank dikatakan memiliki kinerja yang tinggi apabila dapat meningkatkan efisiensinya. Pemilihan variabel yang sesuai mutlak diperlukan agar pengukuran dapat memberikan hasil yang maksimal (Sutawijaya, 2009).

Perhitungan efisiensi BPD dengan analisis DEA ini menggunakan tiga variabel input, yaitu simpanan, total aset tetap, dan beban operasional. Variabel outputnya meliputi total kredit dan pendapatan operasional.

Suatu UKE dikatakan efisien secara relative, jika nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisiensi = 100%). Sebaliknya jika nilai dualnya kurang dari 1, maka UKE bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif (Huri, 2004).

4.2.1. Hasil Perhitungan dan Analisis Efisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia Tahun 2010-2012

Berdasarkan hasil perhitungan metode DEA dengan *Software* DEAOS, dapat dilihat tingkat efisiensi BPD-BPD di Indonesia pada 4.1. Hasil perhitungan tersebut menggambarkan pencapaian nilai tingkat efisiensi masing-masing BPD sangat beragam.

Tabel 4.1
Tingkat Efisiensi BPD di Indonesia
(Studi pada 26 BPD yang terdaftar di BI)
Ditinjau dari output Total Kredit
Tahun 2010-2012 (persen)

Nama BPD	Efisiensi Total Kredit			Rata-Rata
	2010	2011	2012	
BPD Sulawesi Tenggara	100	88	94	94
BPD Yogyakarta	84	100	79	88
BPD Kalimantan Timur	100	100	94	98
PT Bank DKI	63	81	100	81
PT Bank Aceh	100	100	99	100
PT Bank Kalimantan Tengah	85	84	61	77
PT BPD Jambi	86	100	100	95
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	85	70	100	85
PT BPD Lampung	94	100	70	88
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	72	77	73	74
PT BPD Sumatera Barat	100	100	75	92
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	62	65	67	65
PT BPD Maluku	72	73	56	67
PT BPD Bengkulu	74	83	90	82
PT BPD Jawa Tengah	94	100	100	98
PT BPD Jawa Timur	84	100	85	90
PT BPD Kalimantan Barat	78	70	71	73
PT BPD Nusa Tenggara Barat	84	83	73	80
PT BPD Nusa Tenggara Timur	100	100	100	100
PT BPD Sulawesi Tengah	100	100	100	100
PT BPD Sulawesi Utara	17	7	12	12
PT BPD Bali	100	100	100	100
PT BPD Kalimantan Selatan	100	98	93	97
PT BPD Papua	93	92	100	95
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	33	27	51	37
PT BPD Sumatera Utara	78	74	69	74
Rata-Rata	82	84	81	

Sumber: *Data Envelopment Analysis Software Online* “diolah”

Merujuk pada software online (D.E.A.O.S) dikatakan efisien apabila tingkat efisiensinya mencapai 100%, begitu pula sebaliknya dikatakan tidak efisien apabila tingkat efisiensinya kurang dari 100%. Data pada tabel 4.1 diatas

menunjukkan bahwa BPD masih belum mencapai tingkat efisiensi 100% (inefisien).

Pada tahun 2010 BPD yang telah mencapai tingkat efisiensi 100% hanya BPD Sultra, BPD Kaltim, Bank Aceh, BPD Sumbar, BPD NTT, BPD Sulteng, BPD Bali, dan BPD Kalsel. Terdapat 6 BPD yang tetap bertahan pada tingkat efisiensinya dari tahun 2010 sampai tahun 2011 yaitu BPD Kaltim, Bank Aceh, BPD Sumbar, BPD NTT, BPD Sulteng, dan BPD Bali. Sedangkan pada tahun 2012 BPD yang mencapai tingkat efisiensi 100% lebih sedikit daripada tahun 2011 yaitu Bank DKI, BPD Jambi, BPD Sulselbar, BPD Jateng, BPD NTT, BPD Sulteng, BPD Bali, dan BPD Papua.

Tabel 4.2
Tingkat Inefisiensi BPD di Indonesia
(Studi pada 26 BPD yang terdaftar di BI)
Ditinjau dari output Total Kredit
Tahun 2010-2012 (persen)

Nama BPD	Inefisiensi		
	2010	2011	2012
BPD Sulawesi Tenggara	-	88	94
BPD Yogyakarta	84	-	79
BPD Kalimantan Timur	-	-	94
PT Bank DKI	63	81	-
PT Bank Aceh	-	-	99
PT Bank Kalimantan Tengah	85	84	61
PT BPD Jambi	86	-	-
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	85	70	-
PT BPD Lampung	94	-	70
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	72	77	73
PT BPD Sumatera Barat	-	-	75
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	62	65	67
PT BPD Maluku	72	73	56
PT BPD Bengkulu	74	83	90
PT BPD Jawa Tengah	94	-	-
PT BPD Jawa Timur	84	-	85
PT BPD Kalimantan Barat	78	70	71
PT BPD Nusa Tenggara Barat	84	83	73
PT BPD Sulawesi Utara	17	7	12
PT BPD Kalimantan Selatan	-	98	93
PT BPD Papua	93	92	-
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	33	27	51
PT BPD Sumatera Utara	78	74	69

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Dari tabel 4.2 BPD yang inefisiensi pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu BPD Lampung dan BPD Jateng (94%) dan yang terendah yaitu BPD Sulut (17%). Sedangkan pada tahun 2011 yang inefisiensi tertinggi yaitu BPD Kalsel (98%) dan yang terendah yaitu BPD Sulut (7%). Dan pada tahun 2012 yang tertinggi yaitu Bank Aceh (99%) dan yang terendah yaitu BPD Sulut (12%).

Perhitungan DEA tidak hanya mengukur nilai efisiensi dari masing-masing BPD yang ada dalam sampel, tetapi juga memberikan referensi atau acuan bagi BPD di Indonesia yang berada dalam kondisi inefisien menjadi efisien.

Tabel 4.3 dibawah ini menggambarkan tentang tingkat efisiensi dilihat dari output Pendapatan Operasional.

Tabel 4.3
Tingkat Efisiensi BPD di Indonesia
(Studi pada 26 BPD yang terdaftar di BI)
Ditinjau dari output Pendapatan Operasional
Tahun 2010-2012 (persen)

Nama BPD	Pendapatan Operasional			Rata - Rata
	2010	2011	2012	
BPD Sulawesi Tenggara	100	100	100	100
BPD Yogyakarta	81	100	83	88
BPD Kalimantan Timur	100	93	91	95
PT Bank DKI	67	72	100	80
PT Bank Aceh	100	83	88	90
PT Bank Kalimantan Tengah	87	93	89	90
PT BPD Jambi	100	100	100	100
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	89	84	98	90
PT BPD Lampung	100	100	95	98
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	80	79	83	81
PT BPD Sumatera Barat	100	79	80	86
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	82	100	78	87
PT BPD Maluku	74	86	84	81
PT BPD Bengkulu	80	77	84	80
PT BPD Jawa Tengah	96	100	100	99
PT BPD Jawa Timur	98	93	93	95
PT BPD Kalimantan Barat	70	67	65	67
PT BPD Nusa Tenggara Barat	87	81	88	85
PT BPD Nusa Tenggara Timur	70	84	84	79
PT BPD Sulawesi Tengah	91	76	61	76
PT BPD Sulawesi Utara	100	100	100	100
PT BPD Bali	90	88	100	93
PT BPD Kalimantan Selatan	71	66	71	69
PT BPD Papua	100	100	100	100
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	100	100	48	83
PT BPD Sumatera Utara	62	63	58	61
Rata-Rata	88	87	85	

Sumber: *Data Envelopment Analysis* Software Online “diolah”

Dari hasil perhitungan DEA pada tabel 4.3, pada tahun 2010 hanya terdapat 9 BPD yang sudah mencapai tingkat efisien yang sempurna yaitu BPD Sultra, BPD Kaltim, Bank Aceh, BPD Jambi, BPD Lampung, BPD Sumbar, BPD Sulut, BPD Papua dan BPD Sumselbabel. BPD Sultra, Bank Kaltim, Bank Aceh, dan BPD Sumbar ini pada tahun 2010 selalu mengalami efisiensi dilihat dari output Total Kredit maupun Pendapatan Operasionalnya. Ini menunjukkan bahwa selama satu periode tersebut kinerja perusahaan ini sudah mencapai target yang maksimal dan baik. Pada tahun 2011 BPD yang sudah mencapai tingkat efisien adalah BPD Sultra, BPD Yogyakarta, BPD Jambi, BPD Lampung, BJB, BPD Jateng, BPD Sulut, BPD Papua dan BPD Sumselbabel.

Sedangkan pada tahun terakhir yaitu tahun 2012, BPD Sultra, BPD Jambi, BPD Sulut, dan BPD Papua masih dapat mempertahankan kedudukannya sebagai BPD yang selalu mencapai tingkat efisien dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya keseimbangan penggunaan input perusahaan (Simpanan, Total Aset Tetap, dan Beban Operasional) dengan output Total Kredit dan Pendapatan Operasional. Selain BPD Sultra, BPD Jambi, BPD Sulut, dan BPD Papua ada lagi BPD yang sudah mencapai tingkat efisiensinya dilihat dari output Pendapatan Operasional yaitu BPD Lampung, BPD Jateng dan BPD Sumselbabel, BPD tersebut sama halnya dengan BPD Sultra, BPD Jambi, BPD Sulut, dan BPD Papua akan tetapi perbedaanya BPD ini hanya bisa bertahan selama dua tahun dalam tingkat efisiensinya.

Perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut belum dapat memaksimalkan nilai input dan output yang dimilikinya. Hal

ini berarti nilai input dan output yang dicapai oleh BPD yang inefisien belum dapat meraih target yang sebenarnya (Maflachatun, 2010).

Tabel 4.4
Tingkat Inefisiensi BPD di Indonesia
(Studi pada 26 BPD yang terdaftar di BI)
Ditinjau dari output Pendapatan Operasional
Tahun 2010-2012 (persen)

Nama BPD	Inefisiensi		
	2010	2011	2012
BPD Yogyakarta	81	-	-
BPD Kalimantan Timur	-	93	-
PT Bank DKI	67	72	-
PT Bank Aceh	-	83	-
PT Bank Kalimantan Tengah	87	93	89
PT BPD Jambi	-	-	-
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	89	84	98
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	80	79	83
PT BPD Sumatera Barat	-	79	-
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	82	-	-
PT BPD Maluku	74	86	84
PT BPD Bengkulu	80	77	84
PT BPD Jawa Tengah	96	-	-
PT BPD Jawa Timur	98	93	93
PT BPD Kalimantan Barat	70	67	65
PT BPD Nusa Tenggara Barat	87	81	88
PT BPD Nusa Tenggara Timur	70	84	84
PT BPD Sulawesi Tengah	91	76	61
PT BPD Bali	90	88	-
PT BPD Kalimantan Selatan	71	66	71
PT BPD Sumatera Utara	62	63	58

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 BPD yang mengalami inefisiensi yang tertinggi pada tahun 2010 yaitu BPD Jatim (98%) dan yang terendah yaitu BPD Sumut (62%). Pada tahun 2011 yang mengalami inefisiensi tertinggi yaitu BPD Kaltim, Bank Kalteng, dan BPD Jatim (93%) dan yang terendah yaitu BPD Sumut (63%). Sedangkan pada tahun 2012 yang mengalami inefisiensi tertinggi yaitu BPD Sulselbar (98%) dan yang terendah yaitu BPD Sumut (58%).

BPD-BPD yang sampai saat ini belum mencapai target efisiensinya baik ditinjau dari output total kredit atau output pendapatan operasional adalah perusahaan yang belum bisa mempergunakan jumlah input yang sedikit dengan menghasilkan output yang besar.

Rasio variabel Pertumbuhan Laba pada BPD di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2012 dapat disajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Pertumbuhan Laba pada BPD di Indonesia
(Studi pada 26 BPD yang terdaftar di BI)
Tahun 2010-2012 (persen)

Nama BPD	Rata-Rata
BPD Sulawesi Tenggara	17.13
BPD Yogyakarta	15.41
BPD Kalimantan Timur	8.93
PT Bank DKI	29.72
PT Bank Aceh	60.72
PT Bank Kalimantan Tengah	16.08
PT BPD Jambi	31.86
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.25
PT BPD Lampung	26.93
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2.22
PT BPD Sumatera Barat	26.41
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	17.26
PT BPD Maluku	17.26
PT BPD Bengkulu	47.41
PT BPD Jawa Tengah	14.38
PT BPD Jawa Timur	10.81
PT BPD Kalimantan Barat	-0.77
PT BPD Nusa Tenggara Barat	15.94
PT BPD Nusa Tenggara Timur	27.63
PT BPD Sulawesi Tengah	19.61
PT BPD Sulawesi Utara	-12.65
PT BPD Bali	60.04
PT BPD Kalimantan Selatan	12.21
PT BPD Papua	27.18
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	7.89
PT BPD Sumatera Utara	10.15
Rata-Rata pertahun	19.81

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan laba yang tertinggi pada Bank Aceh yaitu 60.72% dan yang terendah BPD Sulut yaitu -12.65%. Pertumbuhan laba yang baik menjadi salah satu ukuran bahwa BPD mempunyai kinerja usaha yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai BPD tersebut. Pertumbuhan laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah selisih laba tahun yang bersangkutan dengan laba tahun sebelumnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan laba, maka semakin baik posisi BPD tersebut dalam pengolahan kredit, penggunaan aset, dan kemampuan untuk menghasilkan laba BPD tersebut.

4.3. Uji Normalitas

4.3.1. Uji Normalitas data Korelasi

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan (Usman dan purnomo, 2006). Jika hasil Uji K-S menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. Jika hasil Uji K-S menunjukkan nilai probabilitas signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal (Purwanto dalam Uctavia, 2013). Berdasarkan uraian tersebut diatas akan disajikan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov* yang dapat disajikan pada tabel 4.6 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pertumbuhan Laba	Efisiensi
N		26	26
Normal Parameters ^a	Mean	19.81	84.50
	Std. Deviation	16.848	11.819
Most Extreme Differences	Absolute	.175	.155
	Positive	.175	.127
	Negative	-.086	-.155
Kolmogorov-Smirnov Z		.895	.790
Asymp. Sig. (2-tailed)		.400	.561

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Probabilitas hasil uji *Kolmogorov Smirnov* pada tabel 4.6 menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari pertumbuhan yaitu 0.400 lebih besar dari 0.05 atau 5% sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Begitu pula dengan Efisiensi yang menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0.561 lebih besar dari 0.05 atau 5%. Hal ini membuktikan bahwa semua variabel yang akan digunakan dalam pengujian korelasi memiliki distribusi yang normal.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Pengujian Korelasi

Analisis korelasi sederhana (*Bivariate Correlation*) bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut diatas akan disajikan hasil uji korelasi yang dapat disajikan pada tabel 4.7 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Korelasi

		Correlations	
		Efisiensi	Pertumbuhan Laba
Efisiensi	Pearson Correlation	1	.538**
	Sig. (2-tailed)		.005
	N	26	26
Pertumbuhan Laba	Pearson Correlation	.538**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	
	N	26	26

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara efisiensi dengan pertumbuhan laba adalah 0.538. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang cukup atau sedang antara efisiensi dengan pertumbuhan laba. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi efisiensi maka semakin tinggi pula pertumbuhan laba.

4.4.2. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t)

Menurut Hasan (2004) koefisien korelasi sederhana adalah koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan dari dua variabel. Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. (uji dilakukan 2 sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan, jika 1 sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar). Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti

kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesa yang benar sebanyak-banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian) (Duwi, 2011).

Nilai signifikansi koefisien korelasi sederhana yaitu $0.005 < 0.05$, maka H_0 ditolak. Oleh karena nilai signifikansi ($0.005 < 0.05$) maka H_0 ditolak, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara efisiensi dengan pertumbuhan laba. Dikarenakan koefisien korelasi nilainya positif, maka berarti efisiensi berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi berhubungan positif terhadap pertumbuhan laba pada BPD di Indonesia.

Untuk menentukan keeratan hubungan/korelasi antar variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan.

Tabel 4.8
Interval Nilai Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan

No	Interval Nilai	Kekuatan Hubungan
1.	$KK = 0.00$	Tidak ada
2.	$0.00 < KK \leq 0.20$	Sangat rendah atau lemah sekali
3.	$0.20 < KK \leq 0.40$	Rendah atau lemah tapi pasti
4.	$0.40 < KK \leq 0.70$	Cukup berarti atau sedang
5.	$0.70 < KK \leq 0.90$	Tinggi atau kuat
6.	$0.90 < KK \leq 1.00$	Sangat tinggi atau kuat sekali, dapat diandalkan
7.	$KK = 1.00$	Sempurna

(KK = Koefisien Korelasi)

Sumber: Hasan (2004)

Catatan:

- Interval nilai KK dapat bernilai positif atau negatif
- Nilai KK positif berarti korelasi positif
- Nilai KK negatif berarti korelasi negatif

Nilai Koefisien Korelasi yang sebesar 0.538 dapat dinyatakan berdasarkan sumber diatas yang dapat disimpulkan bahwa Koefisien Korelasi antara efisiensi dengan pertumbuhan laba terdapat hubungan yang cukup atau sedang dan berkorelasi positif yang artinya kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, semakin tinggi efisiensi maka semakin tinggi pula pertumbuhan laba.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Hubungan Efisiensi terhadap Pertumbuhan Laba

Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar hubungan efisiensi terhadap pertumbuhan laba pada BPD di Indonesia. Dimana dalam pembahasan ini diambil 26 BPD yang tersebar di Indonesia dengan periode pengamatan 3 tahun terakhir (2010-2012).

Berdasarkan hasil pengujian korelasi antara hubungan efisiensi dengan pertumbuhan laba, dimana dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti ternyata ditemukan ada hubungan yang signifikan antara efisiensi dengan pertumbuhan laba yang menggunakan metode DEA. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Adenovia (2011) dimana ditemukan ada pengaruh yang signifikan antara efisiensi yang diukur menggunakan BOPO dengan pertumbuhan laba pada BPD di Indonesia.

Dari hasil SPSS analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara efisiensi dengan pertumbuhan laba adalah 0.538. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang cukup atau sedang antara efisiensi dengan pertumbuhan laba. Apabila diperoleh angka positif, berarti korelasinya positif. Indeks korelasi

tidak pernah lebih dari 1.00 dan ini menunjukkan bahwa ada korelasi sejar yang searah. Berarti semakin tinggi efisiensi maka semakin tinggi pula pertumbuhan laba.

Ada tidaknya korelasi, dinyatakan dalam angka pada indeks. Betapapun kecilnya indeks korelasi, jika bukan 0.0000, dapat diartikan bahwa antara kedua variabel yang dikorelasikan, terdapat adanya korelasi. *Interpretasi* tinggi-rendahnya korelasi dapat diketahui juga dari besar kecilnya angka dalam indeks korelasi. Makin besar angka dalam indeks korelasi, maka tinggi pula korelasi kedua variabel yang dikorelasikan (Arikunto, 2010). Maka dari sumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks korelasi 0.538 terdapat adanya korelasi yang searah dan hubungannya cukup atau sedang.

Adanya hubungan positif yang berarti kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya semakin tinggi efisiensi maka semakin meningkat pertumbuhan laba yang berdasarkan teori dari Ang (1997) yang menyatakan bahwa semakin perusahaan efisien dalam menggunakan seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersihnya dan semakin cepat perputaran aktiva suatu perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan bersihnya, maka pendapatan yang diperoleh meningkat sehingga laba yang didapat meningkat juga.

Dari penjelasan tersebut dihasilkan korelasi positif dan terdapat hubungan yang cukup atau sedang dikarenakan perusahaan memiliki efisiensi yang tinggi yang dapat menghasilkan *output* yang optimal dengan *input* yang seminimal mungkin. Jadi dari *output* yang optimal tersebut perusahaan dapat menghasilkan laba yang optimal pula.